



Oleh: Dodi Pribadi¹
E-mail : dodi_pribadi@pnri.go.id

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Penguukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional Peluang dan Tantangan Pustakawan Berkiprah di Organisasi Internasional

Abstrak

Organisasi internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan, bersama. Keanggotaan Indonesia pada suatu Organisasi Internasional harus ditetapkan sekurang-kurangnya dengan Keputusan Presiden. Perpustakaan Nasional sebagai pempunan (pusat) kegiatan (*focal point*) organisasi internasional untuk perpustakaan di Indonesia telah mengusulkan keikutsertaan aktif dalam 11 (sebelas) organisasi internasional agar masuk dalam daftar Keputusan Presiden. Keputusan Presiden diperlukan sebagai data dukung utama dalam penganggaran kegiatan pada suatu instansi dalam keikutsertaan pada organisasi internasional.

Kata kunci: perpustakaan, organisasi internasional, keputusan presiden

Pendahuluan

Kerjasama perpustakaan yang dilaksanakan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) merupakan kegiatan Perpusnas dengan satu atau lebih lembaga/instansi/badan/ organisasi yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang memiliki kekuatan hukum, guna mencapai suatu keserasian atau kesepakatan kerja sama dalam memberikan hasil terbaik bagi semua pihak terutama masyarakat pengguna perpustakaan. Pada sisi lain Perpusnas sebagai *focal point* organisasi internasional untuk perpustakaan di Indonesia telah mengusulkan keikutsertaan aktif dalam 11 (sebelas) organisasi internasional agar masuk dalam daftar Keputusan Presiden.

Keanggotaan Indonesia dan kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional diatur dalam Keputusan presiden (Keppres) nomor 64 tahun 1999 yang diterbitkan pada bulan Agustus 1999. Dalam pasal 2 Keppres dimaksud tertera bahwa keanggotaan Indonesia pada suatu organisasi internasional harus ditetapkan sekurang-kurangnya dengan keputusan presiden. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka tertib administrasi dan tersedianya dasar hukum bagi keanggotaan Indonesia dan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan negara yang digunakan sebagai pembayaran kontribusi pemerintah Indonesia bagi keanggotaan pada organisasi internasional, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 membentuk

¹ Pustakawan Madya pada Perpustakaan Nasional RI.

Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi Internasional (Tim Pokja). Tim Pokja atau Kelompok Kerja yang terdiri atas Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan bertugas mengevaluasi keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional yang tidak memiliki dasar hukum yaitu keanggotaan yang terjadi sebelum Keppres nomor 64 tahun 1999 diterbitkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Perpustakaan, melalui Kepala Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, selama tahun 2011 beberapa kali mempresentasikan mengenai organisasi internasional yang telah diikuti selama ini kepada Tim Pokja. Adapun organisasi internasional yang dimaksud adalah :

1. IFLA (*The International Federation of Library Associations and Institutions*)
2. CONSAL (*Congress of Southeast Asian Librarians*)
3. SEAPAVAA (*Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association*)
4. CDNL (*Conference of Directors of National Libraries*)
5. CDNL-AO (*Conference of Directors of National Libraries of Asia and Oceania*)
6. ISBN (*International Standard Book Number*)
7. ISMN (*International Standard Music Number*)
8. SLA (*Special Library Associations*)
9. IASL (*International Association of School Librarian*)
10. ISNI (*International Standard Name Identifier*)
11. IAML (*International Association of Music Libraries*)

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

IFLA merupakan suatu federasi internasional non-pemerintah yang independen dan merupakan organisasi nirlaba. IFLA didirikan tahun 1927 di Edinburgh, Scotland di suatu konferensi internasional. IFLA mempunyai 1600 anggota dari 150 negara yang merepresentasikan 700.000 perpustakaan dan profesional informasi. IFLA terdaftar di Belanda tahun 1971 dan *The Royal Library*, Perpustakaan Nasional Belanda, dijadikan sebagai kantor pusat IFLA.

Organisasi IFLA terdiri dari :

1. *General Assembly*
Merupakan *supreme governing body* yang terdiri dari delegasi anggota voting. Bertemu setiap tahun pada waktu konferensi tahunan, memilih Presiden dan anggota dari *Governing Board*. Mengkondensasikan resolusi umum dan profesional, jika disetujui, akan disampaikan kepada *Executive Committee* dan *Professional Committee* untuk melakukan tindak lanjut yang sesuai.
2. *Governing Board*
Bertanggung jawab terhadap arah pengelolaan dan profesionalitas dari IFLA sesuai dengan *guideline* yang telah ditetapkan oleh *General assembly*. *Governing Board* terdiri dari Presiden terpilih, 10 anggota yang terpilih

secara langsung, 6 anggota yang terpilih secara tidak langsung dari *Professional Committee*.

3. *Executive Committee*
Mempunyai tanggung jawab eksekutif yang didelegasikan oleh *Governing Board* untuk melihat arah kebijakan IFLA yang ditetapkan oleh *Governing Board*. *Committee* ini terdiri dari Presiden terpilih, Bendahara, Ketua *Professional Committee*, 2 anggota *Governing Board* dan Sekretaris Jenderal IFLA.
4. *Professional Committee*
Memastikan dan menkoordinasikan semua tugas dari unit IFLA yang bertanggung jawab terhadap aktivitas profesional, kebijakan dan program kegiatan. *Committee* ini terdiri dari Ketua terpilih dari *Section Officers*, *officer* dari 5 Divisi IFLA ditambah 2 anggota dari *Governing Board*. *Committee* ini bertemu tiga kali setahun, salah satunya adalah pada saat konferensi tahunan.
5. *Divisions and Sections*
Difokuskan pada karya IFLA yang terkait dengan jenis layanan perpustakaan dan informasi dalam aspek ilmu perpustakaan informasi dan/atau dalam kawasan tertentu. Semua anggota IFLA berhak menjadi anggota *Section* sesuai dengan pilihannya masing-masing. Setelah terdaftar, anggota berhak menominasikan *specialist* sebagai anggota *standing committee*. *Standing committee* merupakan kelompok kunci bagi para profesional yang mengembangkan dan memonitor program kegiatan dari *section* (Africa, Asia dan Oceania, Latin America dan Karibia). Setiap *section* dikelompokkan menjadi 5 *Division*. Tiga *Regional Section* (Africa, Asia dan Oceania, Merika Latin dan Karibia) membentuk *Regional Division* (*Division 5*). Divisi ini menaruh perhatian besar terhadap semua aspek dari layanan perpustakaan dan informasi di kawasannya.
6. *Special Interest Groups*
Group ini dapat dibentuk tidak permanen dan bersifat informal yang memungkinkan anggota group berdiskusi tentang hal yang lebih spesifik dibidang profesionalitas, sosial dan budaya yang terkait dengan profesi.

IFLA menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan forum, penyusunan pedoman dan standar di bidang perpustakaan dan informasi, layanan perpustakaan dan informasi, pustakawan dan masyarakat pemustaka di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini IFLA mempromosikan standar yang tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat, profesionalitas yang tinggi bagi pustakawannya, dan juga memberikan akses, perlindungan dan pelestarian terhadap dokumentasi budaya. Hal tersebut dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan profesional, pengembangan standar-standar profesional, penyebarluasan *best practices* dan kemajuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan profesional.

2. Mendorong dan menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya penyelenggaraan layanan prima oleh perpustakaan dan penyediaan informasi di sektor umum maupun swasta secara sukarela.
3. Merepresentasikan pengetahuan dan keahlian yang diminati anggotanya di seluruh dunia.

Keanggotaan :

1. Dalam keanggotaan IFLA tidak ada kewajiban yang mengikat diantara asosiasi dan lembaga perpustakaan dan informasi.
2. Keanggotaan IFLA mempunyai 3 kategori yaitu keanggotaan asosiasi, lembaga dan individu.
3. Keanggotaan terbuka bagi semua perpustakaan, pusat informasi, asosiasi perpustakaan, pustakawan, information professional, mahasiswa jurusan informasi dan perpustakaan, lembaga dan individu.
4. Keanggotaan mulai 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahunnya.
5. Keanggotaan berhenti kalau meninggal, bubar, mengundurkan diri, dan dikeluarkan.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada IFLA :

1. Secara Internasional :
 - a. Dunia perpustakaan dan informasi saat ini berkembang sangat cepat dan pesat, terlebih dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberadaan perpustakaan dan pusat informasi di dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Perpustakaan merupakan bagian dari jaringan perpustakaan dunia, karena tidak satupun perpustakaan yang dapat berdiri sendiri tanpa menjadi bagian dari suatu jaringan. Dengan menjadi anggota jaringan, diharapkan dapat berbagi informasi baik dalam bentuk tercetak, terekam, tertulis dan digital.
 - b. Perpustakaan merupakan bagian dari sistem perpustakaan dunia. Standar Internasional pengelolaan perpustakaan merupakan acuan yang digunakan Indonesia didalam pengelolaan perpustakaan secara nasional.
 - c. Perpustakaan berkontribusi aktif terhadap penyusunan dan pengembangan standar dan pedoman perpustakaan.
 - d. Mendapatkan dan berlangganan terbitan IFLA seperti *Bi-annual IFLA Directory*, *IFLA Annual Report*, *IFLA Journal* dan *IFLA Newsletter*.
2. Secara Nasional :
 - a. Upaya percepatan pengembangan perpustakaan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan berbagi informasi terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan *best practices* dalam

pengelolaan perpustakaan secara baik dan benar yang dapat memuaskan masyarakat.

- b. Standar dan pedoman yang dipergunakan di Indonesia pada umumnya mengacu kepada standar dan pedoman internasional. Dengan demikian diharapkan bahwa pengelolaan perpustakaan di Indonesia berdasarkan kepada standar dan pedoman internasional.
 - c. Keikutsertaan dalam forum internasional di bidang perpustakaan dan informasi sangat diperlukan sebagai upaya menjadi anggota jejaring perpustakaan secara global
3. Secara Teknis :
 - a. Alat kerja di perpustakaan yang digunakan mengacu kepada pedoman yang telah ditetapkan secara internasional misalnya *Dewey Decimal Classification (DDC)* dan *Anglo-American Cataloging Rules (AACR)* dimana Indonesia memperoleh hak menterjemahkan kedua pedoman tersebut kedalam bahasa Indonesia.
 - b. Selain itu juga *Machine Readable Cataloging (MARC)* merupakan format data bibliography. Perpustakaan berkewajiban untuk mengembangkan INDOMARC yang mengacu kepada MARC yang terstandar.
 - c. Perpustakaan juga mendapatkan hak menterjemahkan pengelolaan perpustakaan *Library For All* dan *School Library Manifesto*. Kedua buku ini merupakan acuan terhadap pengelolaan perpustakaan umum dan manifesto dunia tentang keberadaan dan pentingnya perpustakaan sekolah

CONGRESS OF SOUTHEAST ASIAN LIBRARIANS (CONSAL)

CONSAL didirikan tahun 1970 di Singapura sebagai bentuk respon terhadap tumbuh kembangnya rasa identitas diri di lingkungan pustakawan se-Asia Tenggara. Inisiasi pembentukan CONSAL berasal dari *Library Association of Singapore* dan Malaysia. Pada saat itu CONSAL, yang masih merupakan *Conference of South East Asian Librarians*, baru beranggotakan 7 negara yaitu Kambodja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Seiring berjalannya waktu jumlah anggota CONSAL saat ini telah mencapai 10 negara, yaitu Kambodja, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Brunei. Organisasi CONSAL terdiri dari *Executive Boards* dan Sekretariat Jenderal.

1. Executive Board
 - a. Keanggotaan *Executive Boards* terdiri dari 3 anggota nasional untuk setiap negara yaitu :
 - Kepala Perpustakaan Nasional.
 - Ketua Organisasi Profesi.
 - Sekretaris Jenderal atau Perwakilan lainnya dari Organisasi Profesi.
 - b. Bertemu sekurang kurangnya satu kali dalam satu tahun.

- c. Menyimpan laporan kegiatan dan laporan keuangan CONSAL dan menyerahkannya kepada tua rumah berikutnya.
- d. Menyelenggarakan general conference sekali dalam tiga tahun.
- e. Menetapkan Sekretaris Jenderal.

2. Sekretariat Jenderal

- a. Sejak bulan April tahun 2000, CONSAL *Executive Board* beseapat untuk membentuk *CONSAL Secretariat* dengan *hostnya* Singapura selama 3 tahun. Tugas utama *Secretariat* ini mengkoordinasikan *project-project* CONSAL yang setuju oleh *Executive Boards*, namun sejak tahun 2007 *host Secretariat* menempel pada tuan rumah kegiatan *General Conference*.
- b. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Jenderal yang ditunjuk oleh *Executive Board*.
- c. Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai sekretaris dari *Executive Board* dan mengikuti pertemuan *Executive Board*.
- d. Masa kerja Sekretaris Jenderal selama 3 tahun.

Keanggotaan :

1. Keanggotaan dalam CONSAL terdiri dari keanggotaan nasional, keanggotaan asosiasi, keanggotaan kehormatan.
2. Dalam keanggotaan CONSAL tidak ada kewajiban yang mengikat.
3. Keanggotaan tidak dikenakan iuran tahunan.
4. Indonesia telah menjadi anggota CONSAL sejak tahun 1975.

Tujuan CONSAL :

1. Mendirikan, menjaga dan memperkuat jaringan, kemitraan dan hubungan di antara pustakawan, perpustakaan, sekolah perpustakaan dan asosiasi perpustakaan serta intitusi terkait di wilayah Asia Tenggara.
2. Mendorong kerja sama dan menyediakan bantuan dalam pengembangan kepustakawanan, ilmu perpustakaan dan informasi, dokumentasi, informasi dan layanan terkait di wilayah Asia Tenggara.
3. Bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional serta institusi lain dalam upaya mendorong terlaksananya kegiatan dan terwujudnya tujuan CONSAL.
4. Menyediakan forum untuk berbagi dan bertukar informasi serta pengalaman dalam bidang kepustakawanan, ilmu perpustakaan dan informasi serta layanan terkait di wilayah Asia Tenggara.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada CONSAL

1. Secara Internasional :
 - a. Memperkuat rasa persuadaraan di antara anggota negara ASEAN.

- b. Indonesia mempunyai pengaruh yang dominan di dalam pengembangan perpustakaan di Asia Tenggara sehingga keikutsertan Indonesia dalam CONSAL diharapkan dapat meningkatkan dan meragamkan kegiatan kepustakawanan di Asia Tenggara.
- c. CONSAL merupakan suatu organisasi yang mendorong terciptanya semangat kerjasama dan kemitraan yang sejajar didalam mengembangkan kepustakawanan, sehingga keikutsertaan Indonesia didalam CONSAL dapat berbagi *resources* untuk memuaskan pemustaka.
- d. Mendapatkan terbitan CONSAL.

2. Secara Nasional

Dengan adanya forum untuk berbagi dan bertukar informasi serta pengalaman dalam bidang kepustakawanan, ilmu perpustakaan dan informasi serta layanan terkait di wilayah Asia Tenggara maka dapat mempercepat pengembangan perpustakaan dan pustakawan Indonesia.

3. Secara Teknis

beberapa *project* telah dikembangkan bersama antara lain:

- pengembangan minat baca melalui layanan perpustakaan.
- penyusunan *index Ethnobotany*.
- pembuatan koleksi *digital* candi-candi.
- pengumpulan *folklores* di Asia Tenggara.
- pembuatan direktori sekolah perpustakaan.
- pertukaran *expertise* dibidang perpustakaan, informasi dan dokumentasi.
- *sharing* metadata dan konten digital.
- pengembangan jejaring perpustakaan.
- penyusunan pedoman pengelolaan perpustakaan.

ISBN – International Standard Book Number(Standar Internasional nomor buku)

International Standard Book Number atau Standar Internasional Nomor Buku adalah salah satu cara pemberian nomor buku yang diterima semua pihak dengan berpedoman pada standar internasional yang telah ditentukan. Sistem ISBN secara menyeluruh dikelola oleh Badan ISBN (*International ISBN Agency*) yang berkedudukan di Berlin Barat. Sejak tahun 2007 hingga saat ini Badan ISBN berkedudukan di Inggris dan diketuai oleh Brian Green, *Executive Director International ISBN Agency*. Badan ini setiap tahunnya mengadakan "*ISBN International Annual General Meeting*". Fungsi Badan ISBN adalah mengawasi sistem ini, menentukan dan menyediakan identitas kelompok (*Group identifier*), memberi nasihat kepada badan-badan nasional, serta mengalokasi identitas penerbit (*Publisher identifier*). Pelaksanaan ISBN di Indonesia ditangani oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan badan ISBN yang disepakati dan disetujui bersama, baik pihak penerbit dan lembaga perpustakaan lainnya.

Fungsi ISBN

1. Memberikan identitas terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit.
2. Membantu memperlancar arus distribusi buku karena dapat mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemesanan buku.
3. Sarana promosi bagi penerbit karena informasi pencantuman ISBN disebarluaskan baik oleh Badan Nasional ISBN di Jakarta, maupun Badan Internasional yang berkedudukan di London.
4. Untuk mengetahui jumlah terbitan setiap tahunnya di Indonesia.

Keanggotaan

1. Setiap negara anggota Badan ISBN membayar iuran tahun sebesar 250 EURO
Pertemuan "ISBN Annual General Meeting" diadakan setiap tahun.
2. ISBN masuk dalam badan organisasi internasional lain diantaranya :
 - a. *The International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA)
 - b. *The international Council on Archives* (ICA)
 - c. *European Bureau of Library, Information and Documentation Associations* (RBLIDA)
 - d. *The International Music Council* (IMC)
 - e. Bagian dari *Unesco non-governmental Organization* yang berhubungan dengan *The International of Sound Archives* (IASA) .
 - f. Termasuk dalam dua grup *Project Groups on the International Standard Bibliographic Description* (ISBD)
 - g. Berkolaborasi dengan IFLA untuk membahas revisi *ISBDs for Non-Book Materials (NBM) and Printed Music (PM)*.
3. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1985.

Pentingnya Indonesia (Perpusnas) sebagai Anggota ISBN

1. Secara internasional
Keikutsertaan Perpusnas dan Lembaga penerbit, baik swasta maupun pemerintah, dalam pelaksanaan ISBN akan mendatangkan manfaat bagi dunia perbukuan pada umumnya, khususnya dalam hal promosi dan distribusi buku dalam skala internasional.
2. Secara nasional
Indonesia memiliki 34 Provinsi, dengan setiap provinsi yang memiliki sumber daya alam dan kebudayaan yang beragam. Keberagaman tersebut menumbuhkan karya-karya dan tentu saja penerbit-penerbit, baik penerbit swasta maupun penerbit pemerintah yang menjadi sumber informasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. ISBN mempermudah tersimpannya berbagai karya intelektual bangsa atau sumber informasi, sehingga dapat terkumpul kekayaan intelektual bangsa.

Conference of Directors of National Libraries (CDNL)

Conference of Directors of National Libraries merupakan suatu asosiasi independen Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional dari berbagai negara yang dibentuk sebagai wadah diskusi, mempromosikan pemahaman dan kerjasama untuk kepentingan bersama seluruh Peperustakaan Nasional di Dunia. Pertemuan dilaksanakan setiap tahunnya pada hari rabu pada saat *IFLA conference*. Kehadiran Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional pada pertemuan ini dapat diwakilkan kepada para Deputinya.

Perpustakaan Nasional di seluruh dunia mempunyai misi yang sama yaitu menggumpulkan, merekam, mengorganisir, menyimpan dan mempreservasi dan menyediakan akses untuk warisan budaya dan karya intelektual bangsa dalam bentuk dokumentasi. CDNL mempunyai visi jangka panjang yaitu pengembangan perpustakaan digital secara global yang komprehensif, terbuka dan dapat diakses melalui internet. Pengembangan perpustakaan digital secara global diarahkan untuk dapat memberikan akses kepada bahan perpustakaan dari seluruh perpustakaan nasional di dunia untuk mengembangkan penelitian, pendidikan, belajar sepanjang masa, inovasi dan pengembangan ekonomi dan mempromosikan pemahaman bersama secara internasional. Indonesia menjadi anggota CDNL sejak tahun 1975.

Organisasi CDNL

1. *Executive Conference* terdiri dari 3 orang yaitu Ketua dan 2 Wakil Ketua yang dipilih melalui pemungutan suara. Masa kepemimpinannya selama 4 tahun dan mempunyai hak penuh didalam memimpin konferensi.
2. *Committee/ Task Force/ Ad Hoc Group*
Konferensi (CDNL) dengan persetujuan *Executive Conference* dapat membentuk sebuah komite untuk bidang tertentu atau kelompok kerja atau tim ad hoc. Komite/kelompok kerja/tim ad hoc mempunyai tugas untuk melakukan penelitian, kajian dan/atau mengembangkan suatu *project* untuk kepentingan bersama berdasarkan masalah-masalah umum dunia yang terkait dengan perpustakaan, informasi dan dokumentasi.
3. Sekretariat
Ketua membentuk sekretariat untuk mengatur pertemuan, mencatat, menyebarkan informasi hasil pertemuan dan bertanggung jawab terhadap persuratan

Dalam keanggotaan CDNL tidak ada kewajiban yang mengikat:

1. Setiap Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional merupakan anggota CDNL.
2. Keanggotaan terbuka bagi semua Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional.
3. Keanggotaan tidak dipungut biaya.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada CDNL

1. Secara Internasional
 - a. Indonesia menjadi bagian perpustakaan dunia yang harus ikut didalam berkontribusi didalam menyediakan bahan perpustakaan yang dapat diakses secara global untuk kepentingan penelitian, pendidikan, belajar sepanjang masa secara universal.
 - b. Indonesia mempunyai banyak kearifan lokal yang dapat dikembangkan dan dibagi pemanfaatannya secara bersama-sama.
2. Secara Nasional
 - a. Indonesia merupakan negara yang kepulauan yang sangat luas, memiliki banyak ragam informasi kearifan local yang belum ter-*explore* dan ter-*expose* keberadaannya. Dengan menjadi anggota CDNL, Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan yang potensial didalam menyediakan informasi tersebut.
 - b. Informasi yang terhimpun diperpustakaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, belajar sepanjang masa setiap warga negara.
3. Secara Teknis
Beberapa penelitian dan *project* yang dikembangkan bersama:
 - a. Legal deposit.
 - b. Bibliography control.
 - c. Preservation on national hariytage.
 - d. Literacy campaign.
 - e. Digital Library.
 - f. Web archiving.

Conference of Directors of National Libraries in Asian and Oceania (CDNLAO)

CDNLAO (1979) merupakan tindakan lanjutan dari Kepala/Direktur Perpustakaan Nasional wilayah Asia-Oceania yang juga tergabung dalam CDNLAO. Forum ini dibentuk dengan latar belakang salah satunya yaitu persamaan budaya dan sejarah antar bangsa di wilayah Asia Oceania. Pertemuan dilaksanakan setiap tahunnya dengan tuan rumah yang bergantian dan untuk tahun 2012 Indonesia akan menjadi tuan rumah konferensi ini.

Secara umum dapat dikatan bahwa tujuan dari CDNLAO adalah

1. Bertukar informasi dan mempromosikan kerjasama untuk mengembangkan perpustakaan di wilayah Asia dan Oceania.
2. Membantu perpustakaan dari *less developed*.
3. Memahami kondisi terbaru perkembangan perpustakaan anggota CDNLAO.

Keanggotaan

1. Dalam keanggotaan CDNLAO tidak ada kewajiban yang mengikat.

2. Setiap Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional di Asia Oceania merupakan anggota CDNLAO.
3. Keanggotaan terbuka bagi semua Direktur/Kepala Perpustakaan Nasional di wilayah Asia dan Pasific.
4. Keanggotaan tidak dipungut biaya.
5. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 1979.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada CDNLAO

1. Secara Internasional
Indonesia menjadi bagian dari perpustakaan Asia Oceania yang harus ikut didalam berkontribusi secara aktif didalam mempromosikan pemahaman dan kerjasama dibidang perpustakaan, informasi dan dokumentas, mempromosikan dan berbagi sumber daya perpustakaan yang dapat diakses secara global, memberikan bantuan dan/atau menerima bantuan *technical assistance* untuk pengembangan perpustakaan.
2. Secara Nasional
 - a. Indonesia merupakan negara yang kepulauan yang sangat luas, memiliki banyak ragam informasi kearifan lokal yang belum terekplor dan terekspose keberadaannya. CDNLAO dapat menjadi tempat promosi atau memperkenalkan kearifan lokal Indonesia pada Dunia khususnya dalam menyediakan informasi mengenai kearifan lokal Indonesia.
 - b. Informasi yang terhimpun diperpustakaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, belajar sepanjang masa setiap warga negara.
 - c. Menerima bantuan *technical assistance* seperti ketika bencana tsunami di Aceh dan Padang
3. Secara Teknis
Beberapa penelitian dan *project* yang dikembangkan bersama menerima bantuan *technical assistance* pada saat bencana tsunami di Aceh dan Padang, *Web Archiving, Digital Library, Reference services, Preservation*.

Southeast Asia-Pacific audio Visual Archive Association (SEAPAVAA)

SEAPAVAA merupakan forum regional untuk mengemukakan isu-isu umum dan *concern* pada koleksi dan pelestariannya serta menyediakan akses pada koleksi AV yang berupa budaya bangsa kepada masing-masing anggotanya. Tujuan dari SEAPAVAA adalah mempromosikan dan mengembangkan kearsipan audiovisual pada tingkat nasional, regional dan internasional serta memperkuat kapabilitas nasional pada akuisisi audio visual, manajemen, pelestarian dan penyediaan akses pada koleksi audio visual termasuk penelitian, pelatihan dan teknologi alih media serta metodenya maupun pengelolaannya.

Pentingnya keanggotaan Indonesia pada SEAPAVAA

1. Secara internasional
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam sehingga sangat diperlukan untuk melestarikannya menjadi *Memory of the World*.
2. Secara Nasional
Dapat memperluas jaringan kerja sama pada tingkat Asia Tenggara-Pasifik di bidang pengarsipan bahan perpustakaan audio visual serta meningkatkan kualitas pustakawan di bidang pengembangan pengarsipan bahan perpustakaan audio visual dan informasi.
3. Secara Teknis
Sejak Indonesia (Perpusnas) masuk dalam organisasi ini tahun 1993, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui konferensi dan *workshop* diantaranya tahun 1998 di Jakarta, Bandung dan Jogjakarta diperoleh standar alih media digital koleksi audio visual bentuk analog ke bentuk digital serta pengelolaan koleksi yang bersifat perawatan, pemeliharaan dan perbaikan koleksi.

International Standard Music Number (ISMN)

Agency yang memberikan identitas / penomoran terhadap 1 (satu) judul partitur dengan berpedoman pada standar internasional serta mengetahui jumlah partitur music setiap tahunnya. Indonesia masuk sebagai anggota ISMN sejak tahun 2002, yang secara rutin mengadakan pertemuan tahunan (*ISMN International Annual General Meeting*)

International Association of School Librarianship (IASL)

Merupakan forum internasional yang mewadahi orang yang memiliki *interest* terhadap promosi program media perpustakaan sekolah yang efektif sebagai instrumen yang penting dalam proses pembelajaran. IASL juga memberikan panduan dan nasehat dalam mengembangkan program dan profesi perpustakaan sekolah. Dalam menjalankan misinya, IASL bekerjasama dengan asosiasi dan lembaga profesi yang lain.

Tujuan

1. Memberikan advokasi dalam pengembangan perpustakaan sekolah di semua negara.
2. Mendorong integrasi program perpustakaan sekolah dalam pengembangan instruksional dan kurikulum sekolah.
3. Memasyarakatkan peningkatan profesionalisme dan pendidikan yang berkelanjutan tenaga perpustakaan sekolah.
4. Mendorong hubungan yang lebih luas antara tenaga perpustakaan sekolah dan profesi lain yang berkaitan dengan anak dan remaja.

5. Mendorong penelitian di bidang kepustakawanan sekolah dan integrasi dari kesimpulannya dengan pengetahuan yang berkaitan.
6. Memasyarakatkan terbitan dan meyebarluaskan informasi tentang keberhasilan advokasi dan inisiatif program dalam kepustakawanan sekolah.
7. Berbagi informasi tentang program dan materi perpustakaan sekolah untuk anak dan remaja kepada seluruh komunitas internasional.
8. Memprakarsai dan mengkoordinasikan kegiatan, konferensi dan proyek dalam bidang kepustakawanan sekolah dan layanan informasi.

Organisasi IASL terdiri dari *Board of the Association, Executive Committee, Regional Directors* dan Sekretaris.

1. *The Board of Association* adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota, terdiri dari *Executive Committee* dan *Regional Director* yang dipilih. Sekretaris merupakan anggota *ex-officio* dari *Board*, yang tidak memiliki hak untuk melakukan voting.
2. Masa jabatan *regional director* adalah 3 tahun dan tidak boleh dipilih lebih dari dua kali.
3. Pada setiap rapat tahunan asosiasi, anggota *Board* yang masa jabatannya telah berakhir, harus berhenti dari jabatannya, tetapi memenuhi persyaratan untuk dipilih kembali.
4. Anggota Badan hasil dari voting hanya dapat dipilih sesuai dengan peraturan untuk anggota terpilih dari *Executive committee* dan biasanya diharapkan berada pada wilayah yang diwakilinya.
5. Paling sedikit Sembilan *Regional Director* yang terpilih mewakili asosiasi secara geografis. Wakil dari setiap wilayah geografis secara teratur harus dinilai oleh *Executive Committee* untuk menjamin distribusi yang sesuai.
6. Dari waktu ke waktu *Executive Committee* dapat menunjuk petugas tambahan dalam periode tertentu untuk melengkapi kegiatan proyek yang spesifik.

Keanggotaan

Keanggotaan IASL mencakup seluruh dunia dan meliputi dari pustakawan sekolah (tenaga perpustakaan sekolah), guru, pustakawan, Pembina perpustakaan, konsultan, administrator pendidikan dan mereka yang bertanggung jawab terhadap perpustakaan dan layanan informasi di sekolah. Keanggotaan juga meliputi professor dan dosen dari universitas atau perguruan tinggi yang memiliki program untuk perpustakaan sekolah.

Jenis keanggotaan:

1. Individual, meliputi:
 - a. Pribadi yaitu orang yang memiliki interest individu terhadap perkembangan perpustakaan sekolah dan program media perpustakaan sekolah.

Jumlah anggota pribadi tidak dibatasi dan mereka mempunyai hak memiliki posisi dan satu suara dalam rapat umum.

- b. Mahasiswa, jumlah anggota mahasiswa tidak dibatasi dan mereka mempunyai hak memiliki posisi dan satu suara dalam rapat umum.
 - c. Anggota dalam wilayah tertentu yang membayar biaya yang ditentukan dalam zona dimana dia mendaftar. Jumlah anggota mahasiswa tidak dibatasi dan mereka mempunyai hak memiliki posisi dan satu suara dalam rapat umum.
 - d. Anggota Kehormatan adalah mereka yang secara individual memiliki kontribusi yang luar biasa dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Jumlahnya dibatasi hanya sepuluh orang. Mereka mempunyai hak memiliki posisi dan satu suara dalam rapat umum.
 - e. Keanggotaan Purnawirawan adalah mereka yang berusia 65 tahun atau lebih dan terikat dengan kerja penuh waktu. Jumlah anggota pensiunan tidak dibatasi dan mereka mempunyai hak memiliki posisi dan satu suara dalam rapat umum.
2. Institusi adalah anggota yang merupakan lembaga pendidikan dan komersial yang mendukung tercapainya tujuan asosiasi. Jumlahnya tidak dibatasi. Salah satu wakil dari lembaga yang telah dicatat oleh sekretaris mempunyai hak memiliki posisi dan suara dalam rapat umum.
 3. Keanggotaan Asosiasi dapat berupa regional, nasional maupun internasional yang memiliki kegiatan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah keanggotaan tidak dibatasi. Salah satu wakil dari lembaga yang telah dicatat oleh sekretaris mempunyai hak memiliki posisi dan suara dalam rapat umum.
 4. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2006.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada IASL

1. Secara Internasional
Di Indonesia terdapat lebih dari 265.000 sekolah, setiap sekolah diharuskan memiliki perpustakaan sesuai dengan amanat UU nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Berbagai usaha telah dilakukan dalam mengembangkan perpustakaan sekolah di Indonesia diantaranya dengan mengembangkan koleksi, membangun gedung/ruangan perpustakaan, pelatihan tenaga perpustakaan sekolah, penyusunan standar dan pedoman perpustakaan sekolah. Dengan keikutsertaan Indonesia yang memiliki banyak sekolah dan pengalaman dalam mengembangkan perpustakaan sekolah diharapkan dapat memperkuat peran IASL dalam mengembangkan perpustakaan sekolah di dunia.
2. Secara Nasional
Indonesia sudah mulai mengembangkan perpustakaan sekolah di seluruh wilayah tetapi pengembangannya

masih belum merata. Dalam mengembangkan Perpustakaan Sekolah di Indonesia, Perpustakaan Nasional sebagai instansi Pembina perpustakaan sekolah mengusulkan pengintegrasian program perpustakaan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Usulan ini merupakan adaptasi dari kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah di beberapa negara anggota IASL. Selain itu pustakawan sekolah/tenaga perpustakaan sekolah sudah ikut serta dalam menyusun kurikulum sekolah. Indonesia diharapkan dapat belajar dari negara anggota IASL tersebut melalui forum interest yang disiapkan dalam milis, konferensi tahunan maupun konferensi jarak jauh.

Special Library Association (SLA)

Special Library Association adalah organisasi dunia non-profit untuk profesional informasi, perpustakaan di dunia. SLA didirikan pada tahun 1909 di Amerika Serikat, sampai saat ini SLA memiliki lebih dari 11.000 anggota di lebih dari 80 negara. Asosiasi ini memiliki CEO (karyawan dari asosiasi) dan Presiden terpilih (mandat satu tahun), dan pusat SLA di Alexandria, Virginia. Anggota SLA biasanya memiliki gelar master dalam perpustakaan atau ilmu informasi. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, diperlukan analisis untuk memilih, menganalisis, mengelola, menyimpan, dan memberikan informasi dan pengetahuan. Kegiatan Asosiasi mencakup konferensi, pendidikan profesional, jaringan dan advokasi.

Organisasi SLA

Organisasi SLA terdiri dari *advisory council, Board of Directors* yang di dalamnya terdapat, *President, President Elect, Past President, Treasurer, dan Chapter Cabinet, Advisory Council. Board of Directors* merupakan perwakilan dari keanggotaan asosiasi. Direksi bertugas mengontrol asosiasi dalam hal realisasi pelayanan dan pemenuhan kewajibannya kepada anggota. Bertanggung jawab dalam masalah perencanaan, organisasi, operasional, dan audit. *President* berperan sebagai Ketua Dewan Direksi dan pejabat terpilih, bertanggung jawab atas manajemen asosiasi dalam pencapaian visi dan misi asosiasi. *Presiden-Elect* adalah wakil Presiden yang terpilih dalam asosiasi Perpustakaan Khusus, bertugas mendukung Presiden dalam memenuhi tujuan dan sasaran dari Direksi dengan memberikan kontinuitas untuk program dan merumuskan program-program masa depan. *Past President*, mendukung tujuan dan kegiatan Presiden, serta memberikan saran, nasehat, bantuan, dan informasi kepada Presiden, dewan lainnya, komite, dan keanggotaan asosiasi lainnya. *Treasurer* bertanggungjawab dalam masalah keuangan, membantu asosiasi dalam mempersiapkan anggaran tahunan, serta memantau pengeluaran dan pemasukan melalui laporan bulanan, serta membantu memantau asosiasi dalam investasi jangka panjang. *Chapter Cabinet Chair* melayani Dewan Direksi dan SLA bekerja sama dengan Ketua

Kabinet Divisi. Dipilih oleh anggota untuk jangka waktu 3 tahun. *Advisory Council* mempunyai tugas memilih tema, dalam konsultasi dengan Direksi; menentukan tema dan pembicara untuk Sesi Umum; bekerja dengan Unit Perencana Konferensi dan Komite Asosiasi untuk merencanakan dan mengkoordinasikan program Konferensi keseluruhan; bertindak sebagai penghubung antara unit *Association* dan Asosiasi Staf.

Keanggotaan

1. Keanggotaan SLA terdiri perorangan (pustakawan atau pekerja informasi), lembaga, atau kelompok (group).
2. Membayar biaya keanggotaan.
3. Pendaftaran anggota bisa dilakukan secara online.
4. Masa keanggotaan berlaku untuk satu tahun.
5. Keanggotaan SLA terbuka untuk semua negara.
6. Anggota lembaga terdiri dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Perguruan Tinggi, Perpustakaan dan Pengkajian untuk Parlemen, Perpustakaan dari berbagai perusahaan.
7. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2008.

Tujuan SLA

1. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perpustakaan khusus, baik dalam bentuk seminar sharing pengetahuan serta menyediakan jaringan profesional informasi secara online.
2. Sebagai ajang diskusi dan berbagi pengetahuan serta kemungkinan menjalin kerjasama internasional bagi para anggotanya.
3. Mempromosikan dan memperkuat anggotanya melalui pembelajaran, advokasi, dan inisiatif jaringan.
4. Memberikan kesempatan untuk berdiskusi, konsultasi, dan tukar menukar informasi, berkaitan dengan pengembangan perpustakaan dan informasi.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia Pada SLA

1. Secara Internasional
 - a. Mempromosikan pengembangan perpustakaan khusus di Indonesia dalam kancah internasional.
 - b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan kepustakawanan di tingkat internasional.
 - c. SLA menyediakan jaringan profesional informasi di komunitas lokal untuk masing-masing Negara.
 - d. SLA menawarkan beragam kesempatan pengembangan profesional, termasuk program-program terbaik, pendidikan online yang dirancang untuk mempertajam keterampilan profesional.
2. Secara Nasional
 - a. Perpustakaan khusus di Indonesia merupakan perpustakaan yang dikembangkan oleh organisasi atau lembaga baik swasta maupun pemerintah. Keikutsertaan dalam SLA akan mempermudah

bagi perpustakaan khusus dalam mengatasi permasalahan dalam pengembangan perpustakaan khusus di Indonesia.

- b. Informasi mengenai perkembangan pengetahuan, teknologi, dan informasi global berkembang pesat sehingga keikutsertaan dalam forum internasional sangat diperlukan bagi perpustakaan khusus yang berkecimpung dalam pengelolaan informasi.

3. Secara Teknis

Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Komite dan Dewan yang saat ini telah berlangsung, yaitu: *Cataloguing Comittee, Research Services Librarian & Knowledge Management*

International Association of Music Libraries (IAML)

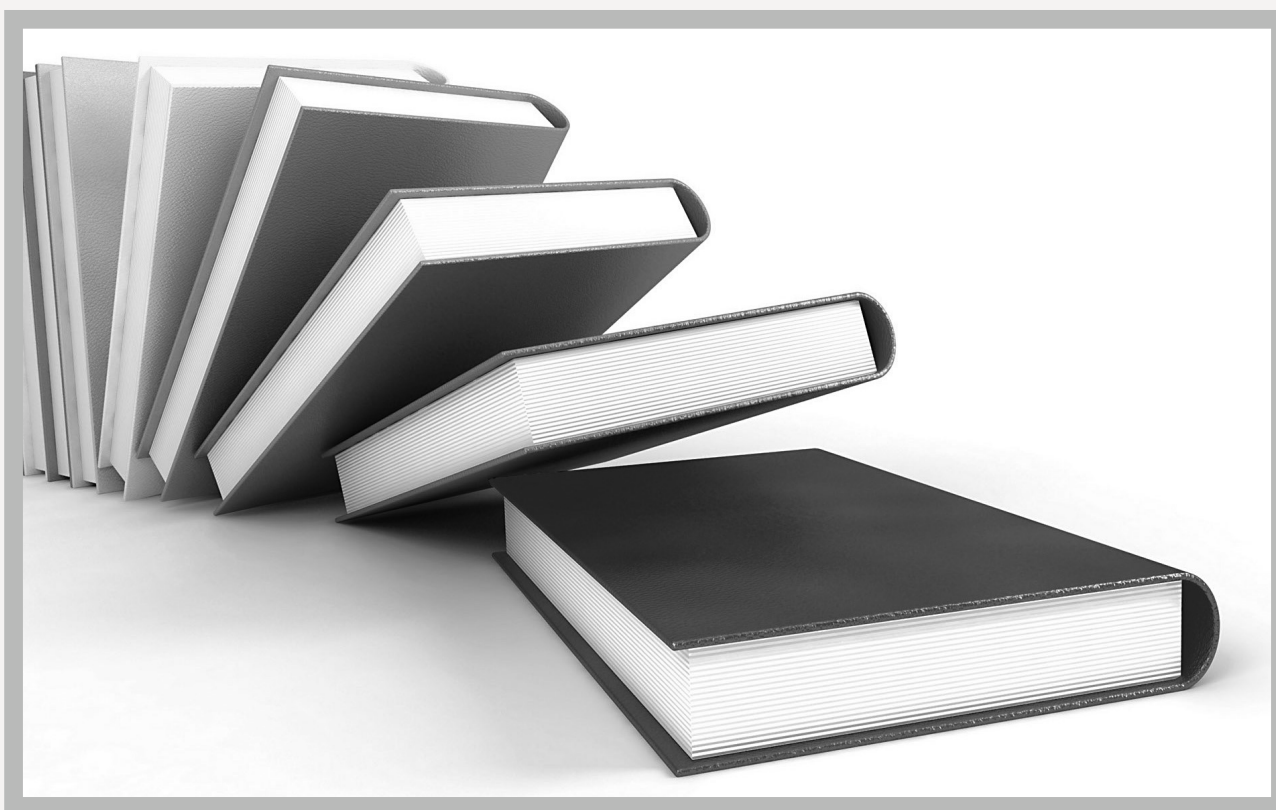
IAML adalah organisasi yang memberikan informasi kepada para anggotanya yang menyangkut didalam penyimpanan dan pengelolaan bahan pustaka berupa lembaran musik seperti :

1. Pengolahan sumber-sumber musik / naskah musik yang muncul termasuk naskah musik pada sisa masa perang.
2. Membuat pusat pemegang kopi photo graphic musik dari negara yang sebagai sumber bahan pustaka tersebut dengan memberikan bentuk berupa microfilm untuk keperluan penelitian.

IAML juga sebagai salah satu *partner* dengan IFLA dan termasuk sebagai badan organisasi yang masuk dalam *IFLA Working Group for ISBD (Printed Music)*. Pada saat sekarang ini keanggotaan IAML sudah mencapai 45 negara di dunia, Bentuk organisasi ini secara resmi telah berjalan sejak tahun 1951

Keanggotaan

1. Setiap negara anggota membayar iuran tahun sebesar 62 EURO.
2. Pertemuan diselenggarakan secara tahunan
3. IAML masuk dalam badan organisasi internasional lain yakni :
 - a. *The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)*,
 - b. *The International Council on Archives (ICA)*,
 - c. *European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)*
 - d. *The International Music Council (IMC)*,
 - e. Bagian dari *UNESCO non-governmental organization* yang berhubungan dengan *the International Association of Sound Archives (IASA) and the International Association of Music Information Centres (IAMIC)*.
 - f. Termasuk dalamn dua grup *Project Groups on the International Standard Bibliographic Description (ISBD)*



- g. Berkolaborasi dengan IFLA untuk revisi membahas revisi *ISBDs for Non-Book Materials (NBM) and Printed Music (PM)*.
 - h. IAML juga bekerjasama dengan *the International Organization for Standardization (ISO) on the development of the International Standard Music Number (ISMN)*.
4. Indonesia menjadi anggota sejak tahun 2002.

Pentingnya Keanggotaan Indonesia pada IAML

1. Secara internasional
Indonesia memiliki kekhasan musik yang tidak dimiliki oleh negara lain misalnya gamelan Jawa, Bali dan lain-lain. Irama musik ini mendapat perhatian dari manca negara. Hal ini menyebabkan irama musik ciri khas Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan di dalam lembaran musik/partitur musik yang perlu dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi aset bangsa yang mendunia
2. Secara nasional
Indonesia termasuk negara yang memiliki beragam musik daerah namun pendokumentasian dan paten dari irama musik tersebut belum terkelola dengan cukup baik, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan mengenai hal tersebut. Dengan mengikuti IAML diharapkan Indonesia mampu memperbaiki pengelolaan irama musik daerah tersebut. Misalnya dengan membuat partitur musik atau notasi angka irama daerah. Bila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka pengakuan terhadap

musik daerah Indonesia dapat mendunia dan terjaga dari klaim negara lain.

The International Standard Name Identifier (ISNI)

Indonesia terdaftar dalam ISO 27729 untuk cakupan dalam bagian indentifikasi Identitas Publik/Masyarakat (*Public Identities*). Identitas ini berkaitan erat dengan berbagai industri media termasuk produksi, manajemen beserta rangkain kontribusinya. ISNI memiliki cara untuk menghindarkan ambiguitas nama-nama yang kemungkinan membingungkan. Oleh karena itu ISNI memiliki sistem yang unik yang dapat memberikan identitas publik/masyarakat secara tepat. Indonesia menjadi anggota ISNI sejak tahun 2011

Keanggotaan

ISNI berpusat di Inggris yakni di *British Library*. Pertemuan diselenggarakan secara tahunan dan iuran pembayaran sebagai anggota. ISNI masuk dalam badan organisasi internasional lain yakni :

1. *International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* (www.cisac.org)
2. *International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)*(www.ifrro.org)
3. *International Performers' Database Association* (ipda.sami.se)
4. *Bowker* (www.bowker.com)
5. *Online Computer Library Center (OCLC)* (www.oclc.org)

6. *Bibliothèque Nationale de France*
7. *The British Library*

Pentingnya Indonesia sebagai anggota ISNI

1. Secara internasional
Indonesia memiliki kekhasan nama/marga/gelar yang tidak dimiliki oleh negara lain misalnya marga Nasution, marga Sitompul, juga gelar Teuku, i dan lain-lain. Nama-nama ini dapat menjadikan ciri khas identitas Indonesia untuk berhubungan dengan dunia internasional/manca negara sehingga nama ciri khas Indonesia memberikan identitas masyarakat yang perlu dikelola dengan baik di dunia maupun di Indonesia.
2. Secara nasional
Indonesia termasuk negara yang memiliki beragam nama dan marga dari berbagai daerah yang memberikan identitas dari daerah mana seseorang itu berasal. Supaya nama/marga tersebut dapat tersimpan dengan baik di perpustakaan termasuk Perpustakaan Nasional perlu dibuat sebuah *authority file* yang dibantu dengan mengikuti ISNI. Dengan menghasilkan *database* nama-nama secara nasional dan disimpan serta dikelola dengan baik oleh perpustakaan maka identitas bangsa Indonesia dapat dikenal oleh negara lain di dunia ini.

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012

Untuk meningkatkan peran serta dan kegiatan Pemerintah Republik Indonesia pada organisasi-organisasi internasional, dipandang perlu untuk melakukan pengkajian terhadap keanggotaan Indonesia pada organisasi-organisasi internasional dengan memperhatikan asas-asas efisiensi, efektivitas, manfaat dan kemampuan keuangan negara,

karena kontribusi adalah beban keuangan yang harus dibayarkan oleh setiap negara anggota kepada organisasi internasional untuk membiayai kegiatan organisasi dan kegiatan program dalam mencapai tujuannya. Yaitu kontribusi yang harus dibayar sebagaimana disepakati bersama dan diatur dalam ketentuan organisasi yang bersangkutan serta formula perhitungannya. Kontribusi pemerintah untuk keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui anggaran Departemen Luar Negeri. Sekitar duaratus empat puluh empat milyar rupiah yang harus dibayarkan untuk keikutsertaan 62 kementerian/lembaga atau lebih kurang 120 organisasi internasional, untuk itu Keanggotaan Indonesia pada suatu Organisasi Internasional harus ditetapkan sekurang-kurangnya dengan Keputusan Presiden. Sehubungan dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional, keikutsertaan Perpustakaan Nasional sebagai *focal point* (pumpunan kegiatan) untuk mengikuti organisasi internasional, dalam lampiran Kepres nomor 32 tahun 2012 telah disetujui untuk mengikuti 6 (enam) Organisasi Internasional. Perpustakaan Nasional berharap Kepres Nomor 32 tahun 2012 dapat berdampak positif untuk pustakawan dan pengelola perpustakaan di Indonesia, hal ini merupakan suatu terobosan bagi pustakawan atau pengelola perpustakaan menyalurkan bakat dan kemampuan yang dimiliki untuk berkecimpung dalam organisasi internasional, di sisi lain dengan berbekal Kepres nomor 32 tahun 2012 dapat dijadikan sebagai data dukung penganggaran kegiatan mengikuti organisasi internasional.

daftar pustaka

Indonesia (1999). *Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999*. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara Indonesia

Indonesia (2012). *Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengukuhan Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional*. Jakarta : Kementerian Sekretariat Negara

Indonesia, Perpustakaan Nasional (2011) *Naskah Urgensi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional*. Jakarta : Perpustakaan Nasional

Indonesia, Perpustakaan Nasional (2013). *20 tahun (1992-2012) memorandum of understanding (MoU) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan instansi (pemerintah/swasta) dalam dan luar negeri*. Jakarta : Perpustakaan Nasional

Conference of Directors of National Library (2008). *Statues of CDNL : Revised*. < http://www.cdnl.info/2008/Statutes_of_CDNL__as_revised_August_2008.pdf >

Conference of Directors of National Library Asian-Oceania . *Statues Amended*. < http://www.ndl.go.jp/en/cdnlao/statutes_amended.pdf >

Conference of Southeast Asian Librarians. (2014) . *About CONSAL*. < <http://www.consal.org/>

International Agency of School Libraries . *About IASL*. < <http://www.iasl-online.org/about/>>

International Association of Music Libraries. *About IAML*. < http://www.iaml.info/organization/what_is_iaml >

International Federation of Library Associations and Institutions (2014). *About IFLA*. <<http://www.ifla.org/about/more>>

Southeast Asia-Pacific Audiovisual Archive Association. < <http://www.seapavaa.com/> >

Special Library Association. *About SLA* < <http://www.sla.org/about-sla/> >